

NASKAH PUBLIKASI

KEBIJAKAN LUAR NEGERI PRESIDEN BARACK OBAMA TERHADAP PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA TAHUN 2009-2016

DONI OKTAMA

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

ABSTRACT

The nuclear crisis that took place on the Korean Peninsula due to the activities of a series of nuclear weapons developments as well as trials often carried out by North Korea, made the issue that could be avoided by the international community, especially large countries such as the United States. The threats given affect neighboring countries such as South Korea and Japan, which are allies of the United States. As a world security guard, the United States must carry out a series of ways to pressure North Korea to stop developing its nuclear weapons. So in the end, the United States through President Barack Obama must create a foreign policy strategy for the problem.

Keywords: Nuclear Crisis, North Korea, United States, Foreign Policy

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang telah menjadi pemenang dalam perang dunia II, sehingga memiliki hak untuk menjadi pengatur keamanan dunia dengan mengatasmakan Dewan Keamanan Internasional. Negara tersebut memiliki setidaknya luas wilayah 9.83 juta km² dengan ibukota yang terletak di Washington D.C. Amerika Serikat dikenal juga sebagai bangsa yang menganut paham Liberalisme yang mencakup demokrasi sebagai sistem politik, kapitalisme sebagai sistem ekonomi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam hal ini mengakibatkan Liberalisme mampu membentuk masyarakat yang individualistis (Pareanom, 2005). Adanya pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat dari George W. Bush kepada Barack Obama menjadi fenomena baru, karena berasal dari kulit hitam di Amerika Serikat. Kebijakan dari Bush yang terkenal keras karena dari partai Republik, berbeda dari senator Obama dari Partai Demokrat yang lebih mengedepankan adanya diplomasi (Muna, 2009, hal. 86-87).

Barack Husein Obama sendiri merupakan seorang politisi yang menjabat sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-44. Ia merupakan orang Afrika Amerika pertama yang dapat menduduki jabatan sebagai presiden di Amerika Serikat. Barack Husein Obama sendiri lahir di Honolulu, Hawaii dari seorang ibu yang bernama Stanley Ann Dunham yang lahir di Wichita, Kansas dengan seorang ayah yang bernama Barack Obama, Sr dari seorang anggota suku Luo di Nyang'oma Kogelo, Kenya. Obama sendiri merupakan lulusan Universitas Columbia dan Harvard Law School, tempat dimana dia menjadi presiden. Pada awalnya ia merupakan seorang penggerak masyarakat di Chicago sebelum mendapatkan gelar hukumnya. Sempat bekerja sebagai jaksa hak-hak sipil di Chicago dan mengajar hukum konstitusi di University of Chicago Law School sejak tahun 1992 sampai 2004.

Dengan berakhirnya Perang Dunia II yang dimenangkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, telah membuka babak baru dalam sejarah politik yang ada di Korea. Dengan impian dan cita-cita sebagai negara

yang berdaulat dan mandiri, Korea menjadi negara yang berada pada kontrol oleh negara-negara yang menjadi pemenang perang dunia II terutama Amerika Serikat (Mas'ood & Yoon, 2003). Korea sendiri terbagi menjadi dua yaitu Utara dibawah kuasa Uni Soviet dan Selatan oleh Amerika Serikat pada masa terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Adanya pemisahan tersebut, menjadi awal mula pengenalan teknologi nuklir bagi Korea Utara oleh Uni Soviet. Sehingga Amerika Serikat merasa was-was dengan hadirnya pengembangan nuklir disana dan hingga sekarang selalu tidak mampu memiliki hubungan baik diantara keduanya.

Dalam pembagian antara Korea Utara dengan Korea Selatan, kerap kali menimbulkan konflik. Perang yang akhirnya terjadi diantara kedua negara pun terwujud yang dimulai sejak tanggal 25 Juni 1950, dan terhenti tiga tahun setelahnya dengan genjatan senjata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua negara sampai sekarang ini masih belum melakukan penandatanganan perjanjian perdamaian. Sehingga kedua negara secara resmi masih dalam keadaan bermusuhan atau perang. Sempat diadakan perjanjian perdamaian, namun dengan segala usaha yang telah dilakukan selalu mengalami jalan buntu. Dari awal konflik dengan Korea Selatan tersebut, Korea Utara melalui program nuklir yang didapat dari Uni Soviet mulai dikembangkan lebih maju. Sehingga program senjata nuklir yang dimiliki Korea Utara akan mereka gunakan sebagai alat bargaining di percaturan internasional. Selain itu juga sebagai alat pertahanan jika sewaktu-waktu mendapatkan ancaman dari musuhnya, terutama terhadap Amerika Serikat.

Adanya perjanjian antara Amerika Serikat dengan Korea Utara pada tahun 1953 yaitu perjanjian genjatan senjata, menjadikan Korea Utara merasa tidak aman dan terancam dengan adanya pemusatan kekuatan militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Korea Selatan. Sehingga memotivasi pemimpin Korea Utara Kim Il-sung untuk melanjutkan program nuklirnya

sendiri dengan bantuan Uni Soviet dan China tahun 1964-an. Korea Utara baru ikut menandatangani perjanjian *Nuclear Non-Proliferation* (NPT) pada tahun 1985 untuk menutupi kekhawatiran Internasional terhadap pengembangan nuklir disana. Namun, dengan adanya penarikan diri Korea Utara dari perjanjian tersebut pada tahun 1993 (Tempo.co, 2017), memunculkan polemik baru dari reaksi dunia khususnya Amerika Serikat yang sangat menentang dan mengecam atas apa yang Korea Utara putuskan. Krisis nuklir Korea Utara berlangsung terus menerus hingga sekarang ini, sehingga Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan penjaga keamanan dunia, melalui politik luar negerinya, Amerika Serikat berusaha untuk bisa mengambil langkah agar Korea Utara bisa mengikuti hukum internasional yang ada terkait aturan-aturan bagi setiap negara yang memiliki teknologi nuklir.

Segala upaya yang telah dilakukan dunia internasional, seperti Dewan Keamanan PBB yang telah terhitung beberapa kali harus mengeluarkan resolusi untuk Korea Utara dalam memberikan sanksi yang serius jika Korea Utara masih memiliki dan mengembangkan program senjata nuklirnya. Selama ini Korea Utara menganut ideologi Juche, yaitu percaya kepada kekuatan sendiri. Sehingga dapat diartikan bahwa Korea Utara menutup diri dari dunia terkait kerjasama antar negara. Pada saat ini terlihat bahwa Korea Utara hanya memiliki hubungan baik dengan beberapa negara saja seperti Tiongkok dan Rusia.

Sebagai negara adikuasa dan memiliki bargaining position di mata dunia, Amerika Serikat termasuk negara yang sering mengalami kewalahan dalam menghadapi program pengembangan nuklir yang dimiliki Korea Utara. Dari awal Amerika Serikat mengetahui adanya pengembangan nuklir di Korea Utara melalui citra satelit mereka, kemudian dilakukannya serangkaian diplomasi serta kebijakan lainnya agar Korea Utara menghentikan program nuklir yang dimilikinya. Walaupun seringkali

mengalami kemajuan dalam menjalin perjanjian, namun seringkali juga terjadi konflik yang tidak sesuai diantara Korea Utara dengan Amerika Serikat atau negara-negara yang ada di sekitarnya seperti Korea Selatan dan Jepang.

Serangkaian uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara kerap kali membuat khawatir dunia internasional. Terkhusus negara yang berdekatan dengan Korea Utara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Amerika Serikat sebagai sekutu dari negara Jepang dan Korea Selatan tidak dapat tinggal diam ketika negara sahabatnya terancam. Dilakukannya serangkaian diplomasi dan tekanan, bahkan pemberian sanksi terhadap Korea Utara, namun tetap saja Korea Utara tidak begitu memperdulikan tekanan yang diberikan Amerika Serikat dan dunia Internasional. Pada masa kepemimpinan Amerika Serikat Presiden Barack Obama, telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menghadapi program nuklir Korea Utara. Dengan tujuan agar Korea Utara melakukan denuklirisasi dan menghentikan program pengembangan senjata nuklir yang dimilikinya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Barack Obama terhadap pengembangan senjata nuklir Korea Utara?”**

C. Landasan Teoritik

1. Politik Luar Negeri

Memiliki pengertian dasar yaitu *action theory* atau kebijaksanaan suatu negara terhadap negara lain untuk suatu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian secara teori, Politik Luar Negeri adalah seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan keluar dari negaranya. Sehingga Politik Luar Negeri merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional, melalui strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil

keputusan yang biasa disebut kebijakan luar negeri (Perwita & Yani, 2005, hal. 47-48).

Menurut Holsti (1988), sebagaimana yang dikutip dalam Perwita dan Yani (2005), tindakan kebijakan yang ada pada politik luar negeri dapat dibedakan menurut sarana yang digunakan, yaitu:

- 1) Diplomasi, merupakan upaya pemerintah untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan nasionalnya, rasionalisasi kepentingannya tersebut, ancaman, janji, dan kemungkinan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima dalam suatu isu terhadap pemerintah negara lain. Pada hakikatnya, merupakan proses negosiasi dimana setiap negara melakukan tawar-menawar dalam suatu isu demi mencapai kepentingan nasionalnya secara optimal melalui jalan yang resmi dan telah mencapai kesepakatan.
- 2) Propaganda, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah suatu negara untuk memberikan pengaruhnya terhadap perilaku dan opini publik negara lain, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah suatu negara yang melakukan propaganda.
- 3) Ekonomi, merupakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memanipulasi transaksi ekonomi internasional demi tercapainya tujuan nasionalnya, yang mana bentuk dari manipulasi tersebut dapat berupa imbalan (*rewards*) maupun dengan paksaan (*coercion*). Sebagai paksaan, maka transaksi ekonomi internasional digunakan untuk memaksa pemerintah negara lain untuk mengubah kebijakan-kebijakannya baik dalam domestik maupun luar negeri. Dalam sarana imbalan, maka transaksi ekonomi internasional digunakan untuk mendukung agar pemerintah negara lain melakukan tindakan-tindakan

yang diinginkan oleh negara yang memberikan imbalan.

- 4) Militer, merupakan upaya pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara lain dengan menggunakan ancaman dan atau dukungan militer (Perwita & Yani, 2005).

Dalam mempelajari politik luar negeri, alangkah baiknya mengetahui pengertian dasarnya, yaitu merupakan teori kebijakan atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai tujuan tertentu. Politik Luar Negeri juga merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sarana untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Perwita & Yani, 2005, hal. 47).

Krisis nuklir yang ada di Semenanjung Korea merupakan isu yang sudah lama ada dan sampai saat ini masih belum dapat ditemukan titik penyelesaian yang berarti. Aktor-aktor internasional diperlukan dalam penanganan isu tersebut, salah satunya negara Amerika Serikat sebagai negara penjaga keamanan dunia. Dengan sarana yang telah dipaparkan oleh Holsti (1988) dalam bukunya Perwita dan Yani (2005), Amerika Serikat melakukan serangkaian cara untuk menghadapi isu yang semakin mengkhawatirkan di Semenanjung Korea. Mulai dari diplomasi hingga sarana militer akan digunakan untuk menghadapi Korea Utara yang semakin sulit dalam menghentikan program senjata nuklirnya.

Tujuan dari dikeluarkannya sebuah kebijakan luar negeri menurut Rosenau (1969) dalam jurnal Yanyan Mochamad Yani (2007), merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dibedakan atas tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Namun pada dasarnya, negara memiliki tujuan jangka panjang, yaitu untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan (Yani, 2007, hal. 5). Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra

mengenai keadaan serta kondisi dimasa depan suatu negara, yang mana pemerintah melalui para perumus kebijakan nasional mampu meluaskan pengaruhnya terhadap negara-negara lain, baik itu dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Dilihat dari sifatnya, dapat bersifat konkret dan abstrak, sedangkan dari segi waktunya dapat bertahan lama dalam periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat sementara, hal tersebut berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu (Yani, 2007).

Dalam kebijakan yang dimiliki Amerika Serikat masa Obama, tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan jangka panjang, dimana ada keinginan ingin tercapainya sebuah keamanan di Semenanjung Korea dan menciptakan perdamaian tanpa adanya konflik atau peperangan.

D. Hipotesa

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah penulis uraikan, Amerika Serikat pada masa Presiden Barack Obama telah mengeluarkan beberapa kebijakan luar negeri untuk menanggapi masalah Korea Utara, yaitu :

1. Melakukan Strategi Kesabaran (*Strategic Patience Approach*)
2. Menjatuhkan Sanksi Terhadap Korea Utara

E. HASIL PENELITIAN

1. Melakukan Strategi Kesabaran (*Strategic Patience Approach*)

Pada tanggal 8 hingga 10 Desember 2009, para pejabat dari pemerintahan Barack Obama telah mengadakan pertemuan tingkat tinggi mereka dengan Pemerintahan Korea Utara di Pyongyang. Dari perwakilan Amerika Serikat dipimpin oleh Stephen Bosworth khusus perwakilan kebijakan Amerika Serikat, yang mana ia memberikan surat dari Presiden Obama untuk Kim Jong-Il. Merupakan hubungan tingkat tinggi pertama antara presiden Barack Obama dengan Pyongyang. Perwakilan Bosworth akan mencari kemungkinan apakah Pyongyang siap untuk kembali melakukan pembicaraan enam

negara terkait program nuklir yang sempat terhenti sejak April 2009, namun tanpa pemberian imbalan apapun terhadap Pyongyang. Menurut pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa kunjungan pertama Bosworth ke Korea Utara tidak bermaksud untuk melanjutkan perjanjian bilateral. Dari pertemuan tersebut memiliki tujuan untuk memutuskan apakah Korea Utara siap dan bersedia untuk kembali menjalankan pembicaraan enam negara dan memulai lagi diskusi serius terkait denuklirisasi nuklir di Semenanjung Korea (News, 2009). Namun dari pertemuan tersebut tidak memberikan hasil yang baik untuk Amerika Serikat dan juga negara sekitar.

Seringnya sikap yang sering berubah-ubah yang dilakukan Korea Utara terhadap Amerika Serikat, Obama harus menerapkan cara diplomasi yang bisa menyesuaikan sikap tersebut. Kebijakan *Strategic Patience* yakni kebijakan yang mana Amerika Serikat akan menunggu Korea Utara untuk membuat keputusan denuklirisasi, hal tersebut berkaitan dengan tenggelamnya kapal Korea Utara dan penembakan terhadap Pulau Yeonpyeong di Korea Selatan pada bulan Maret dan November 2010. Kebijakan tersebut dirumuskan di dalam pemerintahan Obama pada bulan Desember 2009 dan telah dicetuskan pada publik oleh Hillary Clinton (VOA, 2009).

Terdapat penjelasan yang telah dikeluarkan oleh *White House* terkait strategi yang akan digunakan oleh masa Presiden Barack Obama pada politik luar negerinya, yang berkaitan dengan strategi keamanan.

“The challenges we face require strategic patience and persistence. They require us to take our responsibilities seriously and make the smart investments in the foundations of our national power. Therefore, I will continue to pursue a comprehensive agenda that draws on all elements of our national strength, that is attuned to the strategic risks and opportunities we face, and that is guided by

the principles and priorities set out in this strategy. Moreover, I will continue to insist on budgets that safeguard our strength and work with the Congress to end sequestration, which undercuts our national security.” (House, 2015)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat masa Presiden Obama akan menggunakan strategi kesabaran dalam menghadapi Korea Utara.

Menurut Emma Chanlett Avery, kebijakan tersebut adalah kebijakan yang bertujuan untuk bernegosiasi terhadap Korea Utara dengan menerapkan dua cara pendekatan, yaitu :

- a. Waits atau kesabaran, yaitu usaha diplomasi terhadap Korea Utara untuk bernegosiasi dalam meja perundingan.
- b. Pemberian tekanan terhadap rezim Korea Utara. Unsur utama yang ada didasarkan terhadap pemberian tekanan kepada Pyongyang untuk berkomitmen mengambil langkah menuju denuklirisasi, berkoordinasi erat dalam perundingan dan perjanjian dengan Jepang dan Korea Selatan, serta pendekatan terhadap China untuk mengambil langkah keras terhadap Korea Utara (Avery & Rinehart, 2014, hal. 6).

Kebijakan tersebut merupakan kebijakan lanjutan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang sudah ada termasuk sanksi yang sudah diberikan oleh internasional kepada Korea Utara. Kebijakan khusus tersebut lebih mengedepankan pendekatan secara persuasif dengan membuka hubungan diplomatik, mengajak Korea Utara untuk kembali masuk ke dalam Six Party Talks dengan point prioritas, yakni melanjutkan komitmen untuk denuklirisasi, kemauan untuk terlibat (berdasarkan beberapa kondisi), dedikasi kepada tujuan-tujuan yang ada pada kesepakatan Six Party Talks,

dan berusaha untuk bekerja atas dasar prinsip multilateral untuk memberikan sanksi dan menekan Korea Utara (Pritchard & H., 2010). Pada dasarnya, kebijakan ini lebih berbeda dari kebijakan sebelumnya yang sarat akan hubungan langsung antar negara (Defense, 2010). Penerapan kebijakan *Strategic Patience* merupakan respon Amerika Serikat masa Presiden Obama terhadap permasalahan nuklir Korea utara. Kebijakan yang lebih menekankan pada kedudukan pasif dalam mengambil tindakan. Terbukti dari peran Amerika Serikat yang menunggu tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap program nuklirnya untuk dijadikan fokus tindakan apa yang akan diambil selanjutnya.

Pentagon merilis data dari badan *Ballistik Missile Defense Review* pada bulan Februari 2010, bahwa Korea Utara tetap melanjutkan program pengembangan nuklir yang dimilikinya serta misil dengan lintasan yang sama. Dengan adanya laporan tersebut, menyatakan bahwa Korea Utara akan memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk meluncurkan nuklir ke negara-negara tetangganya, bahkan diprediksi Korea Utara memiliki roket yang bisa menjangkau sampai teritorial Amerika Serikat. Adanya *Strategic Patience* yang telah dikemukakan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memiliki karakteristik utama, yaitu bersikap reaktif terhadap pengembangan nuklir Korea Utara, namun tetap bersikap agresif secara multilateral dalam hal menekan Korea Utara. Strategi tersebut merupakan doktrin Amerika Serikat oleh Barack Obama. Merupakan strategi keamanan nasional Amerika Serikat masa Presiden Barack Obama.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Amerika Serikat mengatakan bahwa negaranya sedang mencari kesepakatan yang tepat dengan Korea Utara agar Korea Utara menghentikan program nuklirnya dengan imbalan bantuan ekonomi dan kemanusiaan. Di waktu yang sama, kebijakan tersebut dikawal dengan latihan militer dengan skala yang besar, dengan tujuan untuk diperlihatkan ke Korea Utara

terkait kekuatan militer yang dimiliki Amerika Serikat. Setelah sekian banyaknya proses yang naik dan turun dalam proses penghentian program nuklir Korea Utara, dalam strategi ini Amerika Serikat menempatkan posisi negaranya sebagai negara yang merespon, bukan yang memulai aksi. Dilain sisi, Amerika Serikat gencar memberikan pengaruhnya di kawasan Asia Timur, terutama negara tetangganya Korea Selatan dan Jepang, dan tak terkecuali memasifkan kehadiran militernya dengan Korea selatan. Sehingga dalam *Strategic Patience*, Amerika Serikat melakukan beberapa kerjasama dengan negara-negara yang dekat dengan Korea Utara.

Kerjasama yang telah dilakukan Amerika Serikat terhadap negara-negara yang dekat dengan Korea Utara yaitu seperti Korea Selatan, Jepang, dan China. Korea Selatan dan Jepang sendiri merupakan negara sekutu bagi Amerika Serikat, sehingga perlu adanya kerjasama Trilateral untuk menghadapi krisis nuklir yang ada di Korea Utara. Sedangkan China sendiri, merupakan negara yang kurang memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, sehingga perlu adanya Amerika Serikat melakukan peningkatan hubungan yang lebih baik untuk mengatasi nuklir Korea Utara. Karena China sendiri merupakan negara yang memiliki hubungan baik serta mitra bagi Korea Utara.

Amerika Serikat memberikan garis bawah, bahwa ancaman yang datang dari Korea Utara belum berakhir hingga 50 tahun terakhir. Hal tersebut berlaku tidak hanya untuk Amerika Serikat. namun negara-negara yang berdampingan dengan Korea Utara juga mengalami adanya ancaman. Korea Selatan sendiri berada pada barisan depan dalam hal melakukan perlawanan terhadap Korea Utara, dimana konflik konflik yang ada merupakan warisan dari Perang Dingin. Memberikan perhatian khusus oleh dunia internasional ketika mekanisme diplomasi multilateral yang tertuang dalam *Six Party Talks* pada akhirnya tidak memberikan hasil yang signifikan (Calder, 2013). Kondisi yang ada

pun tentunya memberikan dilema tersendiri bagi negara sekitarnya seperti Korea Selatan, Jepang, dan bahkan Amerika Serikat ketika suatu tatanan keamanan kawasan harus berhadapan dengan ancaman senjata nuklir dari Korea Utara.

Fenomena tersebut pada akhirnya menuntut sebuah pengkajian ulang terhadap keamanan kawasan di Asia Timur bahwa melalui strategi pertahanan bilateral masih dianggap sudah tidak lagi relevan menghadapi ancaman nuklir Korea Utara yang semakin mengalami kemajuan. Dengan begitu, nuklir Korea Utara memaksa Amerika Serikat beserta sekutunya berupaya membuat strategi baru dengan mengedepankan paradigma trilateralisme. Kesepakatan tersebut membuat penyatuan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Ancaman yang ada di kawasan tak terlepas dari adanya China sebagai mitra strategis Korea Utara. Dengan keterlibatan China didalamnya, juga memiliki tujuan untuk melakukan balancing serta adanya upaya untuk melemahkan hegemoni yang dimiliki Amerika Serikat. Hal tersebutlah yang menjadi alasan penting mengapa transformasi paradigma menuju kerjasama trilateralisme sangat dibutuhkan untuk landasan yang akan mengakomodasi kerja sama pertahanan menyeluruh bagi Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan (Park, 2015).

Adanya kerjasama trilateral bagi ketiga negara merupakan salah satu kebijakan Barackj Obama yang mulai berlaku dari tahun 2009 hingga akhir masa Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat. Berbagai macam program kerjasama seperti dalam pertahanan, baik dalam bentuk joint military axercise, joint patrol, maupun military assistance akan diperluas dengan adanya instrumen-instrumen baru seperti cyber war dan teknologi intelligence yang nantinya tidak hanya berguna untuk melacak informasi terbaru dari pengembangan nuklir Korea Utara, namun juga dapat digunakan untuk meretas situs atau berbagai macam sistem komputerisasi yang dimiliki Korea Utara.

Presiden Obama dengan Presiden Park dan Perdana Menteri Abe telah mengadakan pertemuan trilateral di Washington DC. Pertemuan tersebut menghasilkan persetujuan untuk menerapkan secara keseluruhan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2270. Selain itu para pemimpin negara tersebut sepakat bahwa perlu adanya untuk meyakinkan Korea Utara, bahwa senjata nuklir tidak akan membantu negara tersebut (KBSWorldRadio, 2016). Ketiga negara juga akan berkoordinasi dengan forum-forum multilateral lainnya termasuk PBB juga seperti KTT Asia Timur, *International Civil Aviation Organization* (ICAO), dan *International Maritime Organization* (IMO). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa negara-negara lain juga ikut bergabung dalam mengutuk tindakan provokatif yang telah dilakukan Korea Utara terkait rezim nuklirnya.

Selain itu, ketiga negara juga melakukan kerjasama dalam bidang militer. Pertemuan yang dilakukan di Departemen Pertahanan AS yang dipimpin oleh Kepala Staff Gabungan Militer AS, Jenderal Joseph Dunford yang bertemu dengan Pasukan Militer Terpadu SDF (*Self-Defense Forces*) Jepang Laksamana Katsutoshi Kawano, dan Kepala Staff Gabungan Korea Selatan Lee Sun-jin tersebut, memiliki kerjasama dalam berbagai informasi rahasia terkait program nuklir yang dimiliki Korea Utara. Amerika Serikat memberikan komitmennya bahwa akan membela Jepang dan Korea Selatan dan akan menggunakan kemampuan militernya mulai dari konvensional, nuklir, hingga pertahanan rudal guna menangkal nuklir yang dimiliki Korea Utara (Malau, 2016)

Kerjasama yang kedua yaitu meningkatkan hubungan baik dengan China. Kerjasama yang dilakukan Presiden Obama tersebut dilakukan pada tahun 2016. Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan presiden China Xi Jinping telah berjanji akan melaukan kerjasama dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara, sambil bekerja untuk mempersempit perbedaan yang terus terjadi mengenai

keamanan dunia maya, hak asasi manusia, dan konflik maritim. Obama membuka pertemuan puncak keamanan global terkait nuklir di Gedung Putih bersama dengan para pemimpin Jepang dan Korea Selatan dalam menyerukan langkah-langkah bersama untuk mencegah Korea Utara. Bahwasannya presiden Obama dengan Xi Jinping akan berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Amerika Serikat sendiri telah lama mendesak China sebagai sekutu tradisional Korea Utara untuk mengambil peran yang lebih kuat dalam menekan Korea Utara agar menghentikan program senjata nuklirnya. Pemerintah Obama dengan dukungan peran China mampu meloloskan sanksi ketat dari PBB yang mana memberikan hukuman terhadap Korea Utara, dan Amerika Serikat juga mendesak agar China dapat berperan dalam menerapkan sanksi-sanksi tersebut dengan patuh (SouthChinaMorningPost, 2016). Dari pemimpin China Xi Jinping pun mengatakan kepada Presiden Obama bahwa semua pihak harus menghindari kata-kata atau tindakan apa pun yang dapat meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea dan tidak melakukan apa pun yang dapat mempengaruhi kepentingan keamanan negara lain.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, disebutkan bahwa kedua negara bertekad akan meningkatkan kerjasama dan memperkuat koordinasi dalam mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea, termasuk melalui penerapan secara penuh resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2270, serta resolusi lainnya yang masih berkaitan. Gedung Putih percaya bahwa China dapat berbuat lebih banyak untuk memberikan tekanan terhadap Korea Utara untuk meninggalkan program nuklir dan rudal yang dimiliki. Namun China memiliki kekhawatiran jika terlalu menekan akan memberikan dampak negatif yang akan mendorong ketidakstabilan dan pergolakan di daerah (KBSWorldRadio, Presiden Obama dan Xi Bahas Ancaman Korea Utara di APEC, 2016).

Perdana Menteri China Li Keqiang mengatakan kepada presiden Obama bahwa Beijing mendukung kerjasama yang lebih erat di Dewan Keamanan PBB dan dalam upaya penegakkan hukum guna menghentikan program nuklir Korea Utara. Hal tersebut dapat menjadi sinyal Beijing akan mendukung sanksi yang lebih keras lagi terhadap Korea Utara yang telah melakukan uji coba nuklir yang kelima kalinya. Membuat China menjadi semakin kesal dengan perilaku Pyongyang dan konsekuensinya. Selama pertemuan antara Li dan Obama di sela-sela sidang Majelis Umum PBB tahunan di New York pada tanggal 20 September 2016, kedua pemimpin negara mengutuk uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara pada tanggal 9 September dan memutuskan untuk memperkuat koordinasi dalam pencapaian denuklirisasi di Semenanjung Korea. Li juga menegaskan selama pembicaraannya dengan Obama bahwa pemerintahannya menolak untuk penyebaran perisai rudal yang ada di Korea Selatan, dan meminta agar semua pihak untuk menahan diri dari setiap kegiatan yang mungkin dapat meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut (SouthChinaMorningPost, China, US to step up cooperation to halt North Korea's nuclear weapons programme, 2016).

Sebagai kebijakan yang reaktif terhadap perkembangan nuklir Korea Utara, dalam *Strategic Patience* juga menempatkan Amerika Serikat sebagai negara yang harus melakukan pertahanan. Sehingga dengan kepercayaan Amerika Serikat bahwa nantinya Korea Utara memiliki rencana menembakkan rudal nuklirnya di daratan Amerika Serikat, maka diperlukannya sebuah sistem pertahanan yang bisa menangkal rudal yang nantinya sewaktu-waktu bisa dikirimkan oleh Korea Utara melalui sistem anti rudal yang dimiliki Amerika Serikat. Sistem anti rudal milik Amerika Serikat yang canggih yaitu *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD).

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) adalah sistem pertahanan rudal

yang unik dan canggih dengan presisi yang tak tertandingi, juga mampu melawan ancaman di seluruh dunia dengan mobilitas tinggi dan penempatan baterai unit strategis. Dibangun oleh Lockheed Martin dan disebut sebagai sistem rudal paling canggih dari sistem lainnya. THAAD bisa berburu dan meledakkan rudal musuh dengan tingkat keberhasilan 100%. Tidak memiliki hulu ledak yang berarti dan hanya menggunakan energi kinetik murni untuk menghancurkan rudal musuh yang dihantamnya (Pagi, 2016).

Konsep dari pertahanan dengan THAAD merupakan usulan yang dicetuskan pada tahun 1987, yang mana permintaan secara formal terkait proposal konsep yang diajukan dalam industri ada pada tahun 1991. Adnya program tersebut, THAAD mendapat manfaat dari hasil upaya pertahanan rudal sebelumnya, yaitu *High Endoatmospheric Defence Interceptor* (HEDI) dan *The Kinetic Kill Vehicle Integrated Technology Experiment* (KITE) (Atkinson, 1996). Pada bulan September 1992, Angkatan Darat lebih memilih Martin Marietta yang saat ini disebut Lockheed Martin sebagai kontraktor utama dalam pengembangan prototipe fisik, kemudian perangkat lunak *Aero Optical Effect* (AOE) dikembangkan untuk memvalidasi profil operasional dari desain Lockheed. Tes awal THHAD pada bulan April 1995 dengan semua uji penerbangan dalam fase program demonstrasi validasi (DEM-VAL) yang terjadi di White Sands Missile Range.

Rudal THAAD diproduksi di fasilitas Lockheed Martin dekat dengan wilayah Try, Alabama. Didalam fasilitas tersebut, dilakukan integrasi akhir, perakitan dan pengujian dilakukan. Radar yang ada pada THAAD adalah X-Band aktif yang dipindai secara elektronik, array yang ada pun dikembangkan dan dibangun oleh Raytheon di Andover, Massachusetts Integrated Air Defense Facility (Agency, 2012). Pada akhir tahun 2006 dan awal tahun 2007, radar yang dimiliki THAAD sudah dapat beroperasi menggunakan sistem Aegis dan Patriot, melalui pertahanan anti missil dengan 3 lapisan. Pada tanggal 15 Agustus

2012, Lockheed mendapatkan kontrak sebesar USD 150 juta dari Missile Defense Agency (MDA) untuk memproduksi peluncur sistem senjata rudal THAAD serta peralatan kontrol penembakan dan komunikasi untuk Angkatan Darat Amerika Serikat (release, 2012).

Amerika Serikat percaya bahwa nantinya Korea Utara akan menembakkan rudal nuklirnya ke daratan Amerika. Dengan ancaman tersebut, Deputy Direktur Urusan Politik Militer Asia di Departemen Pertahanan Amerika Serikat David Stiwell, mengatakan bahwa kondisi tersebut telah menciptakan suatu kebutuhan akan sistem pertahanan dari rudal Korea Utara yakni THAAD dan untuk ditempatkan di Semenanjung Korea sebagai perlindungan di wilayah sekutu, pasukan Amerika Serikat, dan wilayah Amerika Serikat sendiri. Dalam menghadapi adanya potensi ancaman rudal balistik di kawasan Asia Timur khususnya dari Korea Utara, Amerika Serikat telah membuat suatu alat pertahanan rudal balistik yaitu *Ballistic Missile Defense* (BMD) sebagai komponen utama dalam perlindungan terhadap pasukan tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di kawasan tersebut dan juga diseluruh dunia yang menjadi sekutu Amerika. Aset-aset BMD-nya pun dikerahkan dengan mengirimkan dua kapal perusak yang telah dilengkapi dengan fasilitas persenjataan anti rudal ke pasifik barat, serta juga telah mengerahkan sistem anti rudal THAAD dan PAC-3 ke wilayah Alaska dan Guam. Kerjasama BMD juga dilakukan dengan negara-negara dikawasan Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan agar dapat menyebarkan sistem pertahanan dikawasan tersebut (Bubnova, 2013, hal. 293).

Pada bulan Juni tahun 2009, Amerika Serikat pada masa Presiden Obama, mengerahkan unit THAAD ke Hawaii, bersamaan dengan Radar berbasis laut SBX yang digunakan untuk mempertahankan diri dari kemungkinan nuklir Korea Utara yang menargetkan Amerika Serikat (Gienger, 2009). Kemudian pada bulan April 2013, Amerika Serikat menyatakan bahwa Alpha

Battery, yaitu Resimen Artileri Pertahanan Udara ke-4 akan dikerahkan ke Guam guna untuk mempertahankan wilayah dari kemungkinan serangan IRBM Korea Utara yang menargetkan pulau tersebut (Burge, 2013).

Pada tanggal 17 Oktober 2013, militer Korea Selatan meminta terhadap Pentagon untuk memberikan informasi terkait sistem THAAD dari harga dan kemampuan yang dimilikinya sebagai bagian untuk menangkal serangan rudal balistik Korea Utara (ArmyRecognition, 2013). Namun pemerintah Korea Selatan dari Park Geun-hye memutuskan akan mengembangkan sendiri dengan alih-alih membeli THAAD. Pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan sebelumnya meminta informasi mengenai THAAD serta pencegat rudal lainnya seperti Arrow 3 Israel, dengan tujuan untuk meneliti sistem guna bahan untuk mengembangkan teknologi domestik daripada membelinya. Namun dari para pejabat menyatakan bahwa penyebaran Amerika Serikat dari sistem THAAD akan membantu dalam menangani ancaman rudal Korea Utara (KBSWorldRadio, 'S.Korea Requested Information on THAAD to Develop L-SAM', 2014). Pada bulan Mei 2014, pihak Pentagon mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempelajari lokasi untuk penanaman baterai THAAD di Korea Selatan.

Pada bulan Juli 2016, para pejabat militer Amerika dan Korea Selatan sepakat untuk menggunakan sistem pertahanan rudal THAAD di negara tersebut guna menangkal serangan yang datang dari Korea Utara yang semakin menunjukkan peningkatan dalam melakukan uji coba rudal balistik dan nuklir. Setiap unit THAAD terdiri dari 6 peluncur yang dipasang di truk, 48 pencegat, 1 unit kontrol kebakaran dan komunikasi, dan sebuah radar AN/TPY-2 (Judson, 2016). Kabupaten Seongju di Provinsi Gyengsang Utara menjadi tempat sebagai situs THAAD, dan sebagian karena berada jauh diluar jangkauan artileri roket Korea Utara yang ada di sepanjang DMZ. Namun, hal tersebut mendapatkan protes dari warga

karena dikhawatirkan akan memberikan radiasi yang dipancarkan oleh Radar AN/TPY-2 dapat mengganggu kesehatan mereka, dan dapat merusak tanaman melon oriental yang sangat terkenal di kawasan tersebut (Padden, 2016). Sehingga pada tanggal 30 September 2016, Amerika Serikat dan Korea Selatan akan memindahkan THAAD ke Lotte Skyhill Seongju Country Club, daerah yang lebih jauh dari perumahan utama kota dan memiliki ketinggian yang lebih tinggi dari tempat sebelumnya, guna meredakan kekhawatiran warga.

Untuk Jepang sendiri, pada bulan November 2015, Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani menyampaikan bahwa ia akan mempertimbangkan Amerika Serikat dalam menyebarkan THAAD di Jepang guna melawan ancaman rudal balistik Korea Utara (ArmyRecognition, Japan is considering deployment of US missile defense system including the THAAD 42411153, 2015). Namun, hingga bulan Oktober 2016, Jepang masih mempertimbangkan untuk pembelian THAAD atau Aegis Ashore dalam hal untuk menambah lapisan pertahanan rudal baru (Kubo & Kelly, 2016).

Jika dibandingkan dengan sikap Amerika Serikat era sebelum Obama, dalam *Strategic Patience* dapat dikatakan lebih cermat bila dihitung dengan wacana ideal kebijakan yang mengutamakan pengaruh di kawasan tersebut. Namun, kebijakan ini juga memiliki kelemahan, yaitu memberikan keleluasan waktu terhadap Korea Utara untuk mengatur segala agenda yang mereka miliki, hal tersebut bertentangan dengan opsi diplomatik yang dimiliki Amerika Serikat. Selanjutnya, Amerika Serikat akhirnya menempatkan dirinya beserta aliansinya untuk lebih bersikap reaktif (Avenson, 2010, hal. 1-2). Akibat dari pengaruh *Strategic Patience* adalah menguatnya pengaruh militer yang dimiliki Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan di Laut Kuning.

2. Menjatuhkan Sanksi Terhadap Korea Utara

Presiden AS Barack Obama, Presiden Korea selatan Park Geun-hye, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah sepakat untuk sama-sama mengambil langkah yang signifikan, termasuk sanksi baru untuk menunjukkan kepada Korea Utara bahwa ada konsekuensi terhadap setiap tindakan yang melanggar hukum dan berbahaya. Ketiga negara telah mengadakan rapat tertutup dengan Dewan Keamanan PBB, yang mana Dewan Keamanan sangat mengutuk uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara.

Beberapa sanksi yang telah dijatuhkan Amerika Serikat pada masa Presiden Barack Obama seperti telah dibekukannya aset pemerintah Korea Utara yang ada di Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB juga telah menjatuhkan sanksi serta perintah untuk menginspeksi seluruh kargo yang datang maupun meninggalkan Korea Utara baik melalui darat, laut, dan udara. Dari Departemen Keuangan Amerika Serikat juga telah menjatuhkan sanksi terhadap Kim Jong Un dan 10 petinggi Korea Utara lainnya yakni dengan pembekuan aset-aset mereka di Amerika Serikat dan melarang warga Amerika Serikat untuk berbisnis dengan Kim Jong Un (Sanders-Zakre, 2018).

Hingga tahun 2013, Amerika Serikat mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi kepada Korea Utara karena aktifitas uji coba nuklirnya, yaitu dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2094. Tidak jauh berbeda dengan resolusi-resolusi sebelumnya yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan PBB terkait nuklir Korea Utara, yaitu secara tegas mengutuk atas uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dan meminta agar negara tersebut untuk menghapus semua senjata pemusnah masal yang dimilikinya (Council, 2013). Selain memberikan sanksi tegas terhadap Korea Utara yang diberlakukan secara umum, Dewan Keamanan PBB juga menerapkan sanksi terhadap beberapa pihak secara individual yang telah ikut terlibat dalam program pengembangan nuklir Korea

Utara. Sanksi individual tersebut yakni berupa larangan bepergian atau berkunjung keluar negeri serta pembekuan aset yang dimiliki. Adapun inti dari dikeluarkannya resolusi tersebut adalah untuk menekan akses-akses Korea Utara dalam mengembangkan program nuklirnya (Davenport, 2013).

Beberapa nama yang telah masuk ke dalam daftar yang terkena sanksi antara lain, Yon Chong-nam dan Ko Chol-chaе, keduanya merupakan petinggi yang ada di *Korea Mining Development Trading Corporation* (KOMID), yaitu sebuah lembaga yang mengurus bentuk penjualan senjata di Korea Utara. Selain mereka berdua, terdapat nama lain, yaitu Mun Chong-chol, adalah petinggi di Tanchon Commercial Bank (TCB). Bank tersebut juga terindikasi sebagai pendukung program nuklir Korea Utara, sehingga aset yang dimiliki pun dibekukan oleh resolusi 2094. Selain itu terdapat aset lain yang juga dibekukan, yaitu Second Academy of Natural Sciences yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan nuklir Korea Utara. Selanjutnya adalah Korea Complex Equipment Import Corporation, yaitu sebuah perusahaan yang mendukung industri senjata nuklir Korea Utara (Council, Security Council Strengthens Sanctions on Democratic People's Republic of Korea, in Response to 12 February Nuclear Test, 2013).

Selain sanksi-sanksi yang diberikan berupa pembekuan aset dan larangan bepergian keluar negeri, terdapat sanksi lain yang berlaku pada resolusi 2094, yaitu larangan transaksi jual beli barang mewah berupa perhiasan seperti permata, berlian, zamrud,, dan mutiara. Larangan transaksi pun juga berlaku untuk jual beli terhadap alat transportasi mewah seperti kapal pesiar, gerbong kereta, dan mobil racing. Pada dasarnya, sanksi yang diberikan tersebut hampir mirip seperti apa yang sudah diberlakukan terhadap nuklir Iran, yang mana dinilai cukup berhasil menekan Iran. Selain itu juga, duta besar Amerika Serikat untuk PBB mengatakan bahwa sanksi

tersebut merupakan sanksi yang paling berat bagi Korea Utara (Mustafaga, 2013).

Kemudian pada tanggal 6 Januari 2016, Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ke empat, sehingga mendapatkan kecaman dunia internasional dan terkhusus oleh Amerika Serikat. Dewan Keamanan PBB pun melakukan pertemuan pada tanggal 2 Maret 2016. Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah menetapkan sanksi baru bagi Korea Utara, yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2270 (Council, Security Council Imposes Fresh Sanctions on Democratic People's Republic of Korea, Unanimously Adopting Resolution 2270 (2016), 2016). Resolusi tersebut mendapat dukungan para anggota di PBB, terutama Amerika Serikat yang menyatakan persetujuannya atas dikeluarkannya resolusi tersebut.

Secara umum mungkin tuntutan yang diminta dari Dewan Keamanan PBB masih sama dengan yang sebelumnya, namun pada resolusi tersebut dapat dikatakan sangat lengkap. Adapun isi dari resolusi tersebut adalah larangan uji coba nuklir Korea Utara dan meminta Korea Utara untuk menghentikan segala bentuk pengembangan senjata pemusnah massal tanpa ada pengecualian. Sanksi terbaru yang diberlakukan untuk Korea Utara ini memang diatur sedemikian rupa untuk menasar jantung ekonomi Korea Utara. Hal tersebut memang sengaja dilakukan sebagai bentuk peringatan terhadap Korea Utara yang selalu mengabaikan setiap

resolusi Dewan Keamanan PBB terkait uji coba nuklirnya. Selain dari itu, sanksi terbaru ini merupakan upaya agar Korea Utara mau untuk kembali diajak bernegosiasi di meja perundingan (Berger, 2016).

Pada resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB sangat tegas dalam memberikan sanksi terhadap Korea Utara. Bahkan untuk sanksi yang diberikan sangat spesifik, baik terhadap negaranya, maupun individunya, serta aset-aset yang dimiliki. Setiap negara dilarang memiliki kerjasama, transaksi, atau membantu Korea Utara dalam bentuk apapun terkait hal-hal yang bersangkutan dengan senjata nuklir Korea Utara. Bahkan dunia internasional juga dilarang untuk mengajarkan kedisiplinan ilmu kepada warga Korea Utara yang berkaitan dengan senjata nuklir. Terdapat beberapa nama yang mendapatkan sanksi larangan bepergian keluar negeri dan pembekuan aset terkait program pengembangan senjata nuklir Korea Utara.

Selain sanksi yang diberikan secara individu, melalui resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2270, juga melarang adanya transaksi yang berkaitan dengan barang mewah seperti jam tangan mewah yang terbuat dari logam mulia dan mahal, alat transportasi seperti kapal yang digunakan untuk berlibur, Snowmobile yang harganya melebihi dari USD 2000, peralatan yang terbuat dari kristal, dan perlengkapan untuk olahraga atau rekreasi.

Tabel 1.1

Berikut merupakan nama-nama individu yang mendapat sanksi *Travel Ban/ Asset Freeze*:

No	Nama	Jabatan
1	Choe Chun-sik	Direktur <i>Second Academy of Natural Sciences (SANS)</i> , Ketua program misil jarak jauh Korea Utara
2	Choe Song-il	Pimpinan <i>Tanchon Commercial Bank</i> di Vietnam
3	Hyon Kwang-il	<i>Department Director for Scientific Development at the National Aerospace Development Administration</i>
4	Jang Bom-su	Pimpinan <i>Tanchon Commercial Bank</i> di Suriah
5	Jang Yong-son	Pimpinan <i>Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)</i> di Iran
6	Jon Myong-guk	Pimpinan <i>Tanchon Commercial Bank</i> di Suriah
7	Kang Mun-kil	Penanggungjawab aktivitas pengembangan nuklir di Namhung
8	Kang Ryong	Pimpinan <i>Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)</i> di Suriah
9	Kim Jong-jong	Pimpinan <i>Tanchon Commercial Bank</i> di Vietnam
10	Kim Kyu	Pimpinan <i>Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)</i> bidang urusan luar negeri
11	Kim Tong-myong	Presiden <i>Tanchon Commercial Bank</i>
12	Kim Yong-chol	Pimpinan <i>Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)</i> di Iran
13	Ko Tae-hun	Perwakilan <i>Tanchon Commercial Bank</i>
14	Ri Nab-gon	Menteri Industri Perlengkapan Perang Korea Utara
15	Ryu Jim	Pimpinan <i>Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)</i> di Suriah
16	Yu Chol-u	<i>Director of the National Aerospace Development Administration</i>

Sumber : United Nations Security Council, Resolution 2270, 2016

Tabel 1.2

Berikut merupakan daftar aset Korea Utara yang dibekukan:

No	Entitas	Deskripsi
1	Akademi Ilmu Pertahanan Nasional (<i>Academy of National Defense Science</i>)	Merupakan akademi Yang mendukung penelitian terkait program nuklir Korea Utara
2	<i>Chongchongang Shipping Company</i>	Perusahaan tersebut menggunakan kapalnya dalam melakukan pengiriman senjata konvensional ke Korea Utara pada Juli 2013
3	<i>Daedong Credit Bank</i> (DCB)	DCB tersebut telah memberikan fasilitas terhadap ratusan transaksi keuangan atas nama KOMID dan <i>Tanchon Commercial Bank</i> , dimana kedua lembaga tersebut memiliki hubungan dengan nuklir Korea Utara
4	<i>Hesong Trading Company</i>	HTC merupakan anak perusahaan KOMID yang mendukung program nuklir Korea Utara
5	<i>Korea Kwangson Banking Corporation</i> (KKBC)	KKBC menyediakan jasa keuangan dalam rangka mendukung kegiatan yang berhubungan dengan program nuklir Korea Utara
6	<i>Korea Kwangsong Trading Corporation</i> (KKTC)	KKTC merupakan anak perusahaan <i>Korea Ryongbong General Corporation</i> yang telah banyak mendukung program nuklir Korea Utara
7	<i>Ministry of Atomic Energy Industry</i>	Kementerian Industri Energi Atom yang dibentuk tahun 2013 dengan tujuan untuk modernisasi industri nuklir Korea Utara. Selain itu juga membawahi berbagai macam lembaga riset yang berhubungan dengan program nuklir Korea Utara
8	<i>Munitions Industry Department</i>	Departemen Industri Perlengkapan Perang Korea Utara ini merupakan aspek kunci dari program misil Korea Utara. Bertanggungjawab dalam hal pengembangan rudal balistik Korea Utara
9	<i>National Aerospace Development Administration</i> (NADA)	Merupakan lembaga yang bertugas untuk pembangunan ilmu teknologi luar angkasa Korea Utara, termasuk didalamnya terkait peluncuran satelit dan roket
10	Office39	Biasa disebut sebagai <i>Central Committee Bureau 39</i> , merupakan salah satu lembaga yang mendukung program nuklir Korea Utara
11	<i>Reconnaissance General Bureau</i>	Merupakan badan intelijen Korea Utara yang dibentuk awal tahun 2009
12	<i>Second Economic Committee</i>	Merupakan salah satu aspek terpenting dalam program misil dan nuklir Kora Utara, Lembaga ini juga bertanggung jawab mengawasi produksi rudal balistik Korea Utara

Sumber : United Nations Security Council, Resolution 2270, 2016.

Selain dari 12 entitas yang disebutkan diatas, melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2270 juga merilis bahwa Kapal Korea Utara juga masuk sebagai dalam daftar hitam dari sanksi tersebut. Terdapat 31 kapal yang dimiliki perusahaan pelayaran Korea Utara yaitu *Ocean Maritime Management Compsny* (OMM). Kemudian segala bentuk muatan yang masuk dan keluar dari Korea Utara harus diperiksa terlebih dahulu.

F. KESIMPULAN

Semenanjung Korea memiliki wilayah yang dinilai memang cukup besar, memiliki panjang hingga 1000 km dan memiliki lebar 216 km (Seung-Yoon & Mas'ood, 2003, hal. 1). Terdapat zona demiliterasi yang merupakan pembatas antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Kedua negara tersebut merupakan pendudukan atas dua kekuatan besar pemenang Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet (Seung-Yoon & Mas'ood, Memahami Politik Korea, 2005, hal. 237). Pembagian tersebut dilakukan secara sepihak oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas Konferensi Kairo yang menyatakan bahwa Korea harus menjadi negara yang bersatu.

Namun pada tahun 1945, munculah Konferensi Yalta, yang memperbolehkan Uni Soviet untuk menidrikan negara sebagai zona penyangga dalam memberikan bantuan melawan Amerika Serikat (Weathersby, 1993, hal. 10). Adanya usaha yang dilakukan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam membentuk pemerintahan masing-masing, akhirnya terbentuk *Democratic People of Republic Korea* yang dikenal dengan Korea Utara dan Republic of Korea yang dikenal sebagai Korea Selatan. Pemisahan tersebut diketahui dan dibawah arahan PBB, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya titik temu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam mengimplementasi amanat PBB dalam penyatuan terhadap Korea (Stueck, 1997).

Korea Utara sendiri merupakan salah satu negara komunis yang ada di dunia. Memiliki ibu kota di kota terbesar yaitu Pyongyang. negara dengan satu partai yaitu Partai Buruh Korea. Pemerintahan yang dijalankan menganut ideologi Juche, yaitu ideologi yang menyatakan bahwa mereka percaya pada kekuatan sendiri. Ideologi tersebut digagas oleh Kim Il-sung, mantan pemimpin negara tersebut. Juche menjadi ideologi resmi ketika Korea Utara mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1972. terjadinya Perang Korea dapat

dikatakan akibat munculnya sifat permusuhan yang berawal dari adanya perbedaan pendapat antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Uni Soviet sendiri pada waktu itu mendukung secara penuh terhadap Korea Utara, sehingga pada awal perang Korea Utara dapat mengalahkan Korea Selatan. Walaupun dari pihak PBB memberikan peran dalam perdamaian perang tersebut, dikarenakan adanya campur tangan oleh China, menjadikan konflik tersebut sulit dipadamkan. Sehingga pada tahun 1953 diputuskan perjanjian gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Walaupun demikian, secara resmi perang korea yang melibatkan Korea Utara dengan Korea Selatan masih belum melakukan perjanjian perdamaian hingga sekarang.

Persenjataan nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara, pada awalnya diperoleh pada saat penjajahan Jepang. Dimana Jepang mendirikan industri militer di kawasan Korea Utara, namun semenjak adanya kejadian di Hiroshima dan Nagasaki yang menandakan kekalahan Jepang di Perang Dunia II, membuat Jepang mundur dari wilayah Korea Utara. Pengetahuan tentang nuklir diperoleh Korea Utara sebagai senjata pemusnah masal mulai membuat Korea Utara berkeinginan untuk memilikinya. Dimulai pada tahun 1947, dimana Uni Soviet yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Gorbachev melakukan penelitian mengenai biji monazite, yaitu salah satu bahan untuk pembuatan nuklir. Karena penelitian tersebut, ternyata didalam biji monazit terkandung bahan -bahan yang dapat menadi pengganti uranium (PBSNewsHour, 2016).

Pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea utara dimulai pada tahun 1956, dimana Korea Utara mendapatkan kerjasama dengan Uni Soviet untuk menggunakan energi nuklir secara damai. Setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama, mulailah Korea Utara mengirimkan ilmuwan dan teknisi terbaiknya ke Uni Soviet untuk mempelajari cara memproses uranium

untuk dijadikan energi nuklir. Program tersebut merupakan program yang diselenggarakan oleh Uni Soviet dalam rangka melatih para ilmuwan dan teknisi dari negara komunis lainnya (Heo & Woo, 2008, hal. 490). Kemudian pada tahun 1965, ditandai dengan didirikannya Akademi Militer di hamsung, yang mana para prajurit tentara Korea Utara dilatih dalam pengembangan rudal (Joseph S. Bermudez, 1999, hal. 2). Serta pada tahun yang sama, Uni Soviet memberikan bantuan besarnya dengan mendirikan pusat penelitian dan fasilitas nuklir di Yongbyon. Dari bantuan tersebut, perlahan Korea Utara mulai meningkatkan program pengembangan nuklir yang dimilikinya.

Bermula dari pengenalan dan bantuan Uni Soviet terhadap program nuklir, Korea Utara mulai menunjukkan dirinya bahwa mereka akan menggunakan berbagai cara agar program pengembangan nuklir mereka dapat berjalan dan menjadi alat yang nantinya dapat digunakan sebagai alat pertahanan negara. Dengan berbagai macam kemajuan, akhirnya juga dapat diketahui oleh Amerika Serikat melalui satelit yang mereka miliki. Sehingga Amerika Serikat merasa jika Korea Utara memiliki senjata nuklir, akan membahayakan bagi negara-negara sekitarnya sebagai sekutu Amerika Serikat seperti Korea Selatan dan Jepang. Sehingga dilakukanlah berbagai cara dari diplomasi, tekanan, hingga sanksi terhadap Korea Utara agar menghentikan program nuklir yang mereka miliki. Bersama dengan Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat beserta sekutunya telah melakukan banyak hal agar terjadi denuklirisasi di Korea.

Namun dari sekian pembicaraan baik secara bilateral maupun multilateral, selalu mengalami jalan buntu atas penyelesaian dari kepemilikan Nuklir oleh Korea Utara.

Amerika Serikat pada masa Barack Obama sebagai Presiden, dalam politik luar negerinya, telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menghentikan sikap Korea Utara yang masih enggan melakukan denuklirisasi. Baik dengan kebijakan luar negeri Strategic Patience Approach, yaitu kebijakan dimana Amerika Serikat akan bersikap sabar terhadap Korea Utara, dimana Amerika Serikat akan bersikap menunggu sikap Korea Utara untuk memberikan reaksi yang akan dikeluarkan nantinya hingga kebijakan dalam memberikan sanksi terhadap Korea Utara baik melalui negaranya sendiri ataupun bekerjasama dengan Dewan Keamanan PBB.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya krisis nuklir di Semenanjung Korea dari awal Barack Obama menjabat sebagai presiden hingga masa akhirnya, Korea Utara masih tetap memperlihatkan atas semakin majunya program nuklir yang mereka miliki. Bahkan dapat diprediksi nantinya dapat memberikan ancaman terhadap negara sekitarnya hingga terhadap Amerika Serikat sendiri. Sehingga sikap Korea Utara yang sering berubah-ubah kebijakan Nuklirnya terhadap dunia internasional, hanya digunakan agar mendapatkan bantuan ekonomi atau menurunkan sanksi yang mereka dapatkan. Hal tersebut semakin mempersulit dunia internasional untuk dapat mempercayai negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alagappa, M. (2008). *The long shadow: nuclear weapons and security in 21st century Asia*. Stanford: Stanford University Press.
- B., C. (1998). *Political Economy: A comparative approach*. Westport: CT: Praeger.
- Bonomi, P. U. (1971). *A Factionous People: Politics and Society in Colonial New York*. Columbia: Columbia U.P.
- Boulden, J. (2009). *United Nations and nuclear orders*. Tokyo: United Nations University.
- Holsti, K. (1988). *Politik Internasional, Jilid 2: Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga.
- Internasional, D. L. (1981). *Sejarah Ekonomi Amerika Serikat*. Jakarta: Garis Besar.
- J., W. (2007). *Inequality Trends in Some Developed OECD Countries*. In J.K.S & J. Baudot(Eds.) *Flat world, big gaps: Economic liberalization, globalization, poverty & inequality*. New York: Zed Books.
- Johnson, R. (2009). *Unfinished business: the negotiation of the CTBT and the end of nuclear testing*. New York & Geneva: United Nations.
- Mas'oeed, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mas'oeed, M., & Yoon, Y. S. (2003). *Politik, ekonomi, Masyarakat Korea: Pokok-pokok Kepentingan dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- N., B. (2004). *Economics of the welfare state*. New York: Oxford University Press.
- Park, C.-k. (2015). *Rethinking North Korea's Denuclearization: Approaches and Strategies*. Stockholm: Institute for Security and Development Policy.
- Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pareanom, Y. A. (2005). *Amerika dan Dunia : Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Seung-Yoon, Y., & Mas'oeed, M. (2003). *Politik Ekonomi, Masyarakat Korea: Pokok-Pokok Kepentingan dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Seung-Yoon, Y., & Mas'oeed, M. (2005). *Memahami Politik Korea*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univerty Press.
- Utgoff, V. A. (2000). *The coming crisis nuclear proliferation: U.S. interests and world order*. Cambridge: MIT Press.
- Widjatmadja, S., & Ambarwati. (2016). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Jawa Timur: Intrans Publishing.

Jurnal :

- Andri. (2014). Kebijakan Amerika Serikat untuk Memenuhi Kepentingan Ekonominya Melalui Trans Pacific Partnership (TPP) periode 2011-2013.

- Avenson, R. (2010). *The Limits of "Strategic Patience"*. Stockholm: Policy Brief. Institute for Security & Development Policy. No. 47.
- Avery, E. C., & Rinehart, I. E. (2014). North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation. *U.S. State Department: Congressional Research Service (CRS) Report no. 7-5700*.
- Beeman, R. R. (2005). The Varieties of Deference in Eighteenth-Century Amerika. *Early American Studies: An Interdisciplinary Journal*, 311-340.
- Berger, A. (2016). From Paper to Practice: The Significance of New UN Sanctions on North Korea. *Arms Control Association*.
- Bubnova, N. (2013). *Missile Defense Confrontation and Cooperation*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.
- Cortright, D., & vayrynen, R. (2009). Chapter one: why disarmament? why now?". *The Adelphi Papers*, 13-32.
- Defense, D. S. (1971). "World-Wide Military Command and Control System (WWMCCS), Department of Defense Directive 5100.30.
- Defense, U. D. (2010). *Ballistic Missile Defense Review Report*. Washington, DC: U.S. Department of Defense.
- Defense, U. D. (2016). *Number of Military and DoD Appropriated Fund (APF) Civilian Personnel Permanently Assigned*. USA: www.dmdc.osd.mil.
- DII, W. C. (2012). Multilateral cooperation and the prevention of nuclear terrorism. *International Affairs*, 349-368.
- Heo, U., & Woo, J.-Y. (2008). The North Korean Nuclear Crisis :Motives, Progress, and Prospects. *Korea observer Vol.39, No.4*.
- Indonesia, K. K. (2014). *Laporan Pelaksanaan Tim Perekonomian Global Kementerian Keuangan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Joseph S. Bermudez, J. (1999). History of Ballistic Missile Development in the DPRK. *Occasional Paper No. 2*.
- Muna, R. (2009). Paradigma Pertahanan Dari Hard Power ke Smart Power. *Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian FISIP Universitas Al Azhar Indonesia Vol 5, no. 1*.
- Pottere, W. C. (2010). The NPT; the sources of nuclear restraint. *Daedalus*, 68-81.
- Pritchard, C. L., & H., T. J. (2010). *U.S Policy Toward the Korean Peninsula. Independent Task Force Report No. 64*. New York: Council on Foreign Relations.
- Reich, J. C. (2011). Achieving the vision of NPT: can we get there step by step? *The Nonproliferation Review*, 369-384.
- Schulte, G. (2010). Stopping proliferation before it starts: how to prevent nuclear wave. *Foreign affairs*, 85.
- Shidqie, H. (2018). Doktrin Monroe: Bentuk Komunikasi Politik Amerika Serikat dalam Menerapkan Politik Proteksi dan Isolasi di Benua Amerika (1823—1911).
- Stueck, W. (1997). The Korean War An International History.
- Tagma, M. (2010). Realism at the limits: post-cold war realism and nuclear

- rollback.”Contemporary Security Policy. *Contemporary Security Policy*, 165-188.
- Theodossiou, E., & Hipple, S. F. (2011). Unemployment Remains High in 2010. *Monthly Labor Review* (Bureau of Labor Statistics), 3-22.
- Weathersby, K. (1993). SOVIET AIMS IN KOREA AND THE ORIGINS OF THE KOREAN WAR, 1945-1950: NEW EVIDENCE FROM RUSSIAN ARCHIVES. *Woodrow Wilson International Center For Scholars, Working Paper No. 8*.
- Wilson, N. (2005). Lessons from the unsuccessful 2005 nuclear non-proliferation treaty. *Medicine, Conflict and Survival*, 274-282.
- Wright, G., & Czelusta, J. (2007). Resource-Based Growth Past and Present. in *Natural Resources: Neither Curse Nor Destiny*, ed. Daniel Lederman and William Maloney, 185.
- Zagare, F. (1996). Classical deterrence theory: a critical assessment.”. *International Interactions*, 365-387.
- Internet :**
- Agency, C. I. (2009, September 30). *The World Factbook*. Retrieved from <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html>
- Agency, M. D. (2012, Oktober 15). *FTI-01 Mission Data Sheet*. Retrieved from Missile Defense Agency: http://www.mda.mil/global/documents/pdf/FTI_01_factsheet.pdf
- ArmyRecognition. (2013, Oktober 18). *Army of South Korea shows interest for the U.S. THAAD*. Retrieved from Army Recognition: http://www.armyrecognition.com/october_2013_defense_industry_military_news_uk/army_of_south_korea_shows_interest_for_the_u.s._thead_terminal_high_altitude_area_defense_1810132.html
- ArmyRecognition. (2015, November 24). *Japan is considering deployment of US missile defense system including the THAAD 42411153* . Retrieved from Army Recognition: http://armyrecognition.com/november_2015_global_defense_security_news_uk/japan_is_considering_deployment_of_us_missile_defense_system_including_the_thaad_42411153.html
- Atkinson, J. W. (1996). *The Theater High Altitude Area Defense program: an interim examination of its acquisition strategy*. California: Monterey, California: Naval Postgraduate School. Retrieved from <https://archive.org/details/theaterhighaltit00atki>
- Azoldra, S. G. (2017). *The 25 Most Powerful Militaries in the World*. Retrieved from Business Insider: <https://www.businessinsider.com/the-worlds-most-powerful-militaries-2017-3/?IR=T>
- Barbar, B. (2012, Maret 11). *Military looking for more tech-savvy recruits*. Retrieved from Springfields: <http://www.springfieldnewssun.com/news/springfield-news/military-looking-for-more-tech-savvy-recruits--1341883.html>
- Burge, D. (2013, April 9). *100 bound for Guam: Fort Bliss THAAD unit readies for historic mission*. Retrieved from El Paso Times: http://www.elpasotimes.com/news/ci_22983471/100-bound-guam
- Calder, K. (2013, Desember 24). *The Strategic US-Japan-Korea*

- Triangle: Emerging Perils and Prospects for Cooperation*. Retrieved from Nippon: <https://www.nippon.com/en/in-depth/a02702/>
- Center, N. P. (2018, Juli 13). *Veterans Preference and "Wartime" Service*. Retrieved from National Archives: <https://www.archives.gov/personnel-records-center/vso/veterans-preference-and-wartime-service#8>
- CNN. (2009, February 14). *Stimulus package en route to Obama's desk*. Retrieved from CNN: <http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/02/13/stimulus/index.html>
- Cohen, E. A. (2004, Agustus). *History and the Hyperpower*. Retrieved from Foreign Affairs: <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2004-07-01/history-and-hyperpower>
- Council, U. N. (2013). *Resolution 2094 (2013)*. Retrieved from United Nations: [https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2094\(2013\)](https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2094(2013))
- Council, U. N. (2013, Maret 7). *Security Council Strengthens Sanctions on Democratic People's Republic of Korea, in Response to 12 February Nuclear Test*. Retrieved from United Nations: <https://www.un.org/press/en/2013/sc10934.doc.htm>
- Council, U. N. (2016). *Security Council Imposes Fresh Sanctions on Democratic People's Republic of Korea, Unanimously Adopting Resolution 2270 (2016)*. Retrieved from United Nations: <https://www.un.org/press/en/2016/sc12267.doc.htm>
- Daily, C. (2009, Januari 23). *Obama asks Pentagon for responsible Iraq drawdown*. Retrieved from China Daily: http://www.chinadaily.com.cn/world/2009-01/23/content_7423535.htm
- Davenport, K. (2013). *Un Security Council on North Korea: Security Council Resolution 2094*. Retrieved from <https://www.armscontrol.org/print/5653#res2094>
- Defense, U. D. (2018, February). *Department of Defense Selected Reserves by Rank/Grade*. Retrieved from www.dmdc.osd.mil: https://www.dmdc.osd.mil/appj/dwp/rest/download?fileName=DRS_42486_SelRes_201802.pdf&groupName=resRankGrade
- Defense, U. S. (2018, February). *Armed Forces Strength Figures*. Retrieved from www.dmdc.osd.mil: https://www.dmdc.osd.mil/appj/dwp/rest/download?fileName=ms0_1802.pdf&groupName=milTop
- Defense, U. S. (2018, Februari). *Department of Defense Active Duty Military Personnel by Rank/Grade*. Retrieved from www.dmdc.osd.mil: <https://www.dmdc.osd.mil/appj/dwp/rest/download?fileName=rg1802.pdf&groupName=milRankGrade>
- Defense, U. S. (2018, February). *Table of Active Duty Females by Rank/Grade and Service*. Retrieved from www.dmdc.osd.mil: https://www.dmdc.osd.mil/appj/dwp/rest/download?fileName=rg1802_female.pdf&groupName=milRankGrade
- Fund, i. M. (2012, Maret). *Report for Selected Countries and Subjects*. Retrieved from <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.as>

- px?pr.x=56&pr.y=10&sy=2009&e
y=2012&scsm=1&ssd=1&sort=cou
ntry&ds=.&br=1&c=111&s=NGD
PD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP
%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=
- Gienger, V. (2009, Juni 18). *Gates Orders Measures Against North Korea Missile (Update2)*. Retrieved from Bloomberg:
<https://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aOrc17s0Mz7g>
- House, T. W. (2015, Februari). *National Security Strategy*. Retrieved from https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf
- Indonesia, B. (2009, Desember 08). *Utusan AS mulai misi ke Korut*. Retrieved from BBC Indonesia:
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2009/12/091208_korut.shtml
- Judson, J. (2016, Juli 7). *THAAD To Officially Deploy to South Korea*. Retrieved from Defense News:
<https://www.defensenews.com/home/2016/07/08/thaad-to-officially-deploy-to-south-korea/>
- KBS. (2016, April 01). *Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang Teruskan Tekanan Terhadap Korea Utara*. Retrieved from KBSWORLDRadio:
http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_Po_detail.htm?No=40846
- KBSWorldRadio. (2014, Juni 5). *'S.Korea Requested Information on THAAD to Develop L-SAM'*. Retrieved from KBSWorldRadio:
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=103072
- KBSWorldRadio. (2016, April 1). *Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang Teruskan Tekanan Terhadap Korea Utara*. Retrieved from KBS World Radio:
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=40846
- KBSWorldRadio. (2016, November 21). *Presiden Obama dan Xi Bahas Ancaman Korea Utara di APEC*. Retrieved from KBS World Radio:
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=43658
- Kubo, N., & Kelly, T. (2016, Oktober 17). *Japan may accelerate missile defense upgrades in wake of North Korean tests: sources*. Retrieved from Reuters - World News:
<https://www.reuters.com/article/us-japan-northkorea-missiles-idUSKBN12H092>
- Louis, F. R. (2013, Februari 28). *National Economic Trends (Nominal GDP)*. Retrieved from research.stlouisfed.org:
<http://research.stlouisfed.org/publications/net/page24.pdf>
- Malau, S. (2016, Oktober 16). *Amerika, Jepang, dan Korea Selatan Bahas Uji Coba Nuklir dan Peluncuran Rudal Korea Utara*. (A. Suhendi, Editor) Retrieved from TribunNews:
<http://www.tribunnews.com/internasional/2016/10/16/amerika-jepang-dan-korea-selatan-bahas-uji-coba-nuklir-dan-peluncuran-rudal-korea-utara>
- Mustafaga, N. B. (2013, Maret 11). *China and UN Security Council Resolution 2094: Is the Third Time the Charm?* Retrieved from Sinonk:
<https://sinonk.com/2013/03/11/chin>

- a-and-un-security-council-resolution-2094-is-the-third-time-the-charm/
- News, B. (2009, Desember 8). *Utusan AS mulai misi ke Korut*. Retrieved from BBC News: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2009/12/091208_korut.shtml
- Padden, B. (2016, Juli 15). *THAAD Radiation Fears Spark South Korean Protests*. Retrieved from Voa News: <https://www.voanews.com/a/thaad-radiation-fears-spark-south-korean-protests/3419467.html>
- Pagi, S. E. (2016, Agustus 21). *Mengenal Sistem Pertahanan Rudal Amerika Serikat*. Retrieved from Jejak Tapak: <https://www.jejaktapak.com/2016/08/21/mengenal-sistem-pertahanan-rudal-amerika-serikat/>
- PBSNewsHour. (2016, April 15). *U.S. researchers see more signs North Korea is producing plutonium*. Retrieved from PBS News Hour: www.pbs.org/newshour/rundown/u-s-researchers-see-more-signs-north-korea-is-producing-plutonium/
- release, L. p. (2012, Agustus 15). *Lockheed Martin Receives \$150 Million Contract To Produce THAAD Weapon System Equipment For The U.S. Army*. Retrieved from Lockheed press release: <http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2012/august/mfc-081512-lm-receives150million.html>
- Sanders-Zakre, A. (2018, September 19). *Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy*. Retrieved from Arms Control Association: <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron>
- School, C. L. (n.d.). *10 U.S. Code § 101 - Definitions*. Retrieved Januari 24, 2019, from Legal Information Institute: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/101#a_4
- SouthChinaMorningPost. (2016, September 20). *China, US to step up cooperation to halt North Korea's nuclear weapons programme*. Retrieved from South China Morning Post: <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2020872/china-us-step-cooperation-halt-north-koreas-nuclear>
- SouthChinaMorningPost. (2016, April 1). *Xi Jinping and Barack Obama agree to cooperate to confront North Korean nuclear threat*. Retrieved from South China Morning Post: <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1932756/xi-jinping-and-barack-obama-agree-cooperate-confront>
- Sss.gov. (n.d.). *Quick Facts and Figures*. Retrieved Januari 24, 2019, from <https://www.sss.gov/About/Quick-Facts-and-Figures>
- Tempo.co. (2017, April 17). *Sejarah Program Nuklir Korea Utara*. Retrieved from Tempo.co: <http://dunia.tempo.co/read/866883/sejarah-program-senjata-nuklir-korea-utara>
- Tribunnews. (2018, April 14). *Beginilah Perbandingan Kekuatan Militer Amerika Serikat vs Rusia*. Retrieved from Tribun Pekanbaru: <http://pekanbaru.tribunnews.com/2>

- 018/04/14/beginilah-perbandingan-kekuatan-militer-amerika-serikat-vs-rusia?page=3
- Vargo, F. (2011, Maret 11). *U.S. Manufacturing Remains World's Largest*. Retrieved from Shopfloor: <http://shopfloor.org/2011/03/u-s-manufacturing-remains-worlds-largest/18756>
- VOA. (2009, Desember 10). *Clinton Calls 'Exploratory' Meeting with North Korea 'Quite Positive'*. Retrieved from VOA News: <https://www.voanews.com/a/clinton-calls-exploratory-meeting-with-north-korea-quite-positive-78980687/416329.html>
- Wolf, J. (2011, Juli 8). *US, allies share of world military spending shrinking study*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/military-spending-usa/us-allies-share-of-world-military-spending-shrinking-study-idUSN1E7661J620110707>
- www.economist.com. (2007, Juli 11). *United States: Political Force*. Retrieved from Economist Intelligence Unit: <http://www.economist.com/Countries/USA/profile.cfm?folder=Profile%20Political%20Forces>
- www.u-s-history.com. (n.d.). *Monroe Doctrine*. Retrieved Januari 24, 2019, from United States History: <https://www.u-s-history.com/pages/h255.html>